BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sistem tata kelola pemerintah di Indonesia mengalami kemajuan yang sangat pesat ditandai dengan pelaksanaan otonomi daerah. Tujuan pelaksanaan otonomi daerah tersebut secara umum adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah, memperbaiki transparansi dan akuntabilitas publik atas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan responsivitas pemerintah terhadap kebutuhan publik, meningkatkan partisipasi publik dalam pembangunan daerah, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan dan pelayanan publik, serta mendorong demokratisasi di daerah (Mahmudi, 2010:2).

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Keuangan Negara, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan, dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas. Pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual menurut Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dilaksanakan paling lambat 5 (lima) tahun. Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun

2005 perlu diganti. Pada tahun 2010 terbit Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagai pengganti peraturan pemerintah 24 tahun 2005. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka peraturan pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Lingkup pengaturan Peraturan Pemerintah ini meliputi SAP Berbasis Akrual dan SAP Berbasis Kas Menuju Akrual. SAP Berbasis Akrual terdapat pada Lampiran I dan berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas. SAP Berbasis Kas Menuju Akrual pada Lampiran II berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP Berbasis Akrual. Laporan keuangan yang dihasilkan dari penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dimaksudkan untuk memberi manfaat lebih baik bagi para pemangku kepentingan, baik berupa pengguna maupun pemeriksa laporan keuangan pemerintah.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kusuma (2013) menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Jember cukup siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual, namun masih ada beberapa kendala terkait dengan implementasi PP No 71 Tahun 2010 seperti: penyusunan LKPD masih dilakukan secara manual (exel) belum ada perangkat khusus, jumlah SDM pelaksana secara kuantitatis dan kualitas masih belum cukup, kurangnya bimtek atau pelatihan, kurangnya sosialisasi, sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi. Penelitian lain dilakukan oleh Herlina (2013) menunjukkan bahwa kesiapan Pemda Kabupaten Nias Selatan mengimplementasikan PP No 71 tahun 2010 dipengaruhi oleh faktor informasi, faktor perilaku dan faktor keterampilan.

Di sisi lain tuntutan transparansi dalam sistem pemerintah semakin meningkat pada era reformasi saat ini, tidak terkecuali transparansi dalam

pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pemerintah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban yang menggunakan sistem akuntansi yang diatur oleh pemerintah pusat dalam bentuk Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang bersifat mengikat seluruh Pemerintah Daerah.

Pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango, pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah dapat dinyatakan cukup baik berdasarkan hasil dari pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Gorontalo yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1.1 Penilaian BPK terhadap kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango selama 3 tahun terakhir

TAHUN	PENILAIAN BPK	PENJELASAN ATAS OPINI BPK
2012	WDP	BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2012 dengan opini "Wajar Dengan Pengecualian". Menurut pendapat BPK laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango per 31 Desember 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Kecuali untuk dampak hal-hal yang berhubungan dengan yang dikecualikan terkait penyajian aset tetap per 31 desember 2012 dan 2011.
2013	WTP	BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2013 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Menurut pendapat BPK laporan keuangan telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango per 31 Desember 2013, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

2014	WTP	BPK RI memberikan opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango TA 2014 dengan opini "Wajar Tanpa Pengecualian". Menurut pendapat BPK laporan keuangan telah disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, pengungkapan dalam laporan keuangan telah cukup memadai untuk pengambilan keputusan para pemakainya, penyajian laporan keuangan bebas dari salah saji material akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perundangan yang berlaku,dan sistem pengendalian intern telah cukup memadai.

Sumber : Bpk.go.id

Berdasarkan tabel di atas membuktikan bahwa kinerja dari pemerintah daerah kabupaten Bone Bolango semakin baik dan sesuai dengan harapan masyarakat terutama dalam hal pengelolaan pendapatan dan aset daerah. Hal ini menjadi tolak ukur tentang tingkat pemahaman sistem akuntansi pemerintah daerah bagi pejabat pengelolaan keuangan daerah yang terlibat didalamnya.

Penerapan basis akrual sesuai dengan PP No 71 tahun 2010, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango tentunya memiliki kekuatan dan kelemahan dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual. Seperti yang diutarakan oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Slamet Wiyardi Ak, MM. Beliau mengatakan bahwa:

> “saya sebagai pimpinan mendukung penuh dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dengan mempertahankan opini WTP yang telah diraih. Akan tetapi dalam pelaksanaan perlunya dilakukan pelatihan bagi tenaga akuntansi terkait teknis akuntansi berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang diterapkan saat ini. Peningkatan kualitas tenaga akuntan ini menjadi modal penting dalam penerapan akuntansi berbasis akrual”.

Hal ini dipertegas oleh kepala bidang akuntansi pada DPPKAD Kabupaten Bone Bolango Andi Idham SE, MM. Beliau menyatakan bahwa:

> "basis kas menuju akrual yang saat ini diterapkan belum semua dipahami oleh masing-masing entitas akuntansi maupun entitas pelaporan, namun sudah harus diberlakukan basis yang baru dalam tahun 2015 yaitu basis akrual sehingga menjadi alasan perlunya dilakukan pelatihan tenaga akuntansi yang langsung mengarah pada praktek-praktek real dilapangan".

Berdasarkan pernyataan diatas menunjukkan bahwa kekuatan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango adalah komitmen pimpinan yang kuat dalam menerapkan basis akuntansi berbasis akrual, adanya kompetensi, keterampilan dan pengetahuan tentang sistem akuntansi pemerintah daerah yang dapat dilihat dari opini WTP yang diraih oleh pemerintah daerah walaupun dalam pelaksanaan basis akrual memiliki kelemahan yaitu masih kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual". Dengan diterapkannya sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual memberikan peluang pada pemerintah untuk menunjukkan keberhasilan pengelolaan sumber daya yang dikelola dengan menghasilkan laporan keuangan yang lebih relevan. Penerapan basis akrual ini diharapkan dapat meminimalisir ancaman korupsi sistemik didaerah.

Penting untuk dipahami bahwa SKPD harus memiliki sumber daya manusia yang kompeten di bidang akuntansi sehingga mampu memahami logika akuntansi dengan baik. Kegagalan sumber daya manusia pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan

standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Oleh karena itu, perlu untuk menentukan strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia khususnya bidang akuntansi dengan menggunakan analisis SWOT. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan, dan Peluang, Namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman (Rangkuti, 2008). Dengan analisis SWOT ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam menetapkan strategi pengembangan kualitas sumber daya manusia bidang akuntansi yang kompeten sehingga mampu menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual sepenuhnya dengan tingkat pemahaman dan kompetensi sumber daya manusia yang memadai.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti faktor internal maupun faktor eksternal yang menjadi kendala dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual terkait sumber daya manusia bidang akuntansi dan menemukan strategi dalam pengembangan kualitasnya. Oleh karena itu penelitian ini diberi judul **"Analisis Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Menerapkan Sistem Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bone Bolango)".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat di identifikasi beberapa masalah penelitian, sebagai berikut:

a. Kurangnya pemahaman tentang sistem akuntansi keuangan daerah berbasis akrual sehingga berdampak pada implementasi basis tersebut.

b. Kurangnya pelatihan tenaga akuntansi tentang teknis akuntansi yang langsung mengarah pada praktek-praktek real dilapangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kesiapan SDM Bidang akuntansi dalam menerapkan sistem akuntansi berbasis akrual?
2. Bagaimanakah strategi pengembangan kualitas SDM yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam upaya penerapan sistem akuntansi berbasis akrual?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masaalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sejauh mana kesiapan SDM Bidang Akuntansi dalam menerapkan sistem akuntansi pemerintah daerah berbasis akrual.
2. Mengetahui strategi-strategi apa saja yang diterapkan pemerintah daerah guna pengembangan kualitas SDM khususnya di bidang akuntansi.

1.5 Manfaat Penelitian

adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini, antara lain:

a. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini bagi pemerintah daerah diharapkan sebagai bahan pertimbangan terkait masalah sumber daya manusia bidang akuntansi dalam penerapan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual sesuai dengan PP No. 71 tahun 2010. Penelitian ini juga diharapkan dapat

dijadikan bahan masukan sehingga dapat memberikan sumbangan pemikiran yang berarti dalam pengambilan keputusan organisasi.

b. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan dan wawasan dalam bidang akuntansi khususnya pengembangan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan referensi atau rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang juga berhubungan dengan sumber daya manusia dan sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual.